

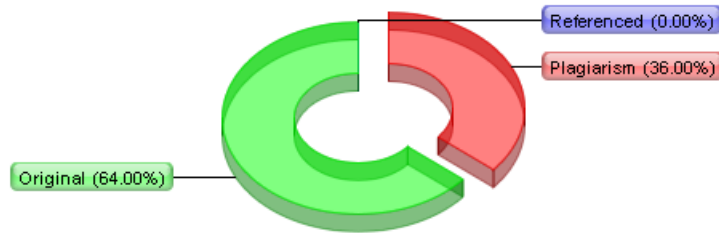
Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 21/05/2019 12:44:52

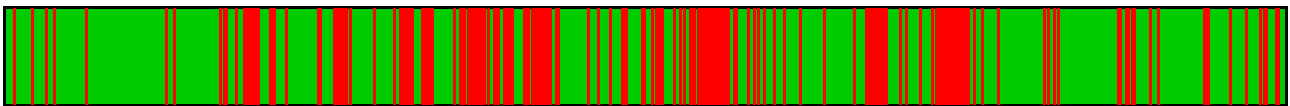
"Hubungan Kerja Badan Permusyawaratan Desa - Fauzia Hanum.pdf"

Licensed to: Universitas Kadiri_License3

Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Word-to-Word. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

| | | | |
|---|------|-----------|---|
| ➡ | % 11 | wrds: 327 | https://ppknsalasiah.blogspot.com/2014/06/otonomi-desa-defenisi-pemerintah-desa.html |
| ➡ | % 10 | wrds: 318 | http://digilib.unila.ac.id/11484/3/BAB%20II.pdf |
| ➡ | % 10 | wrds: 332 | https://alhanisberbagiilmu.blogspot.com/2013/05/peranan-pemerintahan-desa-dan-badan.html |

[Show other Sources:]

Processed resources details:

| | |
|------------------------|--|
| 237 - Ok / 15 - Failed | |
|------------------------|--|

[Show other Sources:]

Important notes:

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>Wikipedia:</p> <p>Wiki Detected!</p> | <p>Google Books:</p> <p>[not detected]</p> | <p>Ghostwriting services:</p> <p>[not detected]</p> | <p>Anti-cheating:</p> <p>[not detected]</p> |
|--|--|---|---|

Excluded Urls:

<https://docplayer.info/50808237-Health-belief-model-on-the-factors-associated-with-the-use...>
<http://docplayer.info/50808237-Health-belief-model-on-the-factors-associated-with-the-use-...>
https://eprints.uns.ac.id/36219/1/S021508054_pendahuluan.pdf
<https://www.neliti.com/publications/235231/health-belief-model-on-the-factors-associated-w...>
https://eprints.uns.ac.id/28793/1/S021408048_pendahuluan.pdf
https://www.researchgate.net/publication/254698569_Development_and_Testing_of_a_Questionna...
<https://www.neliti.com/publications/255470/health-belief-model-on-the-factors-associated-w...>
<https://www.scribd.com/presentation/382102571/health-belief-model-on-the-factors-associate...>
<https://www.slideshare.net/AdeliaPerwita/jurnal-adelia101011056fs01-59375293>
<http://e-journal.unair.ac.id/index.php/JBE/article/download/1299/1058>
<https://anzdoc.com/1masters-program-in-public-health-sebelas-maret-university-s.html>
<https://docobook.com/bab-ii-tinjauan-pustaka-a-kajian-teori-1-imunisasi.html>
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/download/21972/20217>
<http://twa.academia.edu/AnggunCitraLaona>
<http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/mediasosian/article/download/178/133&ved=2ahUKEwiy6...>
<http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/mediasosian/article/download/178/133>
<https://www.scribd.com/document/408756842/178-382-1-PB>
https://www.scribd.com/document/408756842/178-382-1-PB&ved=2ahUKEwiy6OnC56viAhUJfysKHb7PB_...
<https://karyatulisilmiah.com/peranan-badan-permusyawaratan-desa-bpd-dalam-penyelenggaraan-...>
<https://karyatulisilmiah.com/implementasi-kedudukanfungsi-dan-wewenang-badan-permusyawarata...>
<http://repository.uin-suska.ac.id/7121/4/BAB%20III.pdf>
<http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/mediasosian/article/view/178>
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/1507/1202>
<http://repository.uin-suska.ac.id/7290/4/BAB%20III.pdf>
<https://docplayer.info/35376754-Fungsi-badan-permusyawaratan-desa-bpd-dalam-pengawasan-pen...>
<http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklabimkonkeudesapdf>
http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf
<http://docplayer.info/64026377-Pemerintah-kabupaten-gresik-peraturan-daerah-kabupaten-gres...>

Included Urls:

Detailed document analysis:

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara 1 HUBUNGAN KERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DENGAN PEMERINTAH DESA GURAH KABUPATEN KEDIRI (Implementasi

 **Plagiarism detected: 0,2%** <https://docplayer.info/65035284-Lem...> + 3 more resources! id: 1

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9

Pasal 35 Tahun 2006) Fauziah Hanum FISIP Universitas Kediri - Kediri Abstraksi Hubungan kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa Gurah, merupakan Hubungan kemitraan yang meliputi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Hubungan kemitraan ini diatur dalam pasal 35

 **Plagiarism detected: 0,2%** <http://eprints.upnjatim.ac.id/6736/...> id: 2

Perda Kabupaten Kediri Nomor 9 tahun

2006. Kedua lembaga tersebut memiliki tugasnya masing-masing, namun dalam menjalankan fungsinya terdapat keterkaitan yang erat satu dengan lainnya. Tujuan penelitian adalah Mendiskripsikan

 **Plagiarism detected: 0,2%** <https://www.slideshare.net/andykafa...> + 2 more resources! id: 3

Hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa

serta mendiskripsikan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi Perda Kabupaten Kediri tentang

 **Plagiarism detected: 0,2%** <https://www.slideshare.net/andykafa...> + 2 more resources! id: 4

Hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa

Gurah. Dalam mencapai tujuan tersebut digunakan pendekatan kualitatif, sehingga penelitian ini diharapkan mampu menggali informasi yang lebih luas, mendesain, dan mendalami fenomena yang terjadi di obyek studi. Selain itu penelitian diskriptif kualitatif dapat menjelaskan dan mendiskripsikan kondisi yang sedang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dengan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Penentuan informan dengan teknik purposive sampling. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa :

 **Plagiarism detected: 0,3%** <https://www.slideshare.net/andykafa...> + 5 more resources! id: 5

Hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa dapat berjalan dengan

baik sesuai dengan fungsinya masing-masing, hubungan baik ini tidak hanya terjalin pada hubungan antar


lembaga tetapi juga hubungan antar individu, yang memiliki dampak positif terhadap kinerja dua lembaga ini. Hasil dari hubungan kemitraan dan fungsional dari kedua lembaga tinggi di pedesaan tersebut dengan terbentuknya peraturan desa (Perdes) yang aspiratif. Kata Kunci: Hubungan Kerja dan Implementasi 1. Pendahuluan Pemerintahan desa merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan dan sekaligus sebagai muara dari program kerja pemerintah. Artinya semua kebijakan pemerintah di atasnya berakhir di pemerinthan desa, terlaksana atau tidaknya program pemerintah sangat tergantung pada kemampuan aparat serta dukungan fasilitas pemerintahan desa. Oleh karena itu sudah sepatutnya keberadaan sumberdaya manusia pada pemerintahan desa harus tinggi agar dapat menerjemahkan dan melaksanakan apa yang telah diprogramkan oleh pemerintahan di atasnya. Menyadari pentingnya keberadaan pemerintahan desa, serta kompleksitas fakta lapangan yang harus diselesaikan dan dikerjakan oleh pemerintahan desa. Maka pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten Kediri melalui Peraturan Daerah No. 9 pasal 35 tahun 2006 melengkapi pemerintah desa dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai mitra pemerinthan desa. Pasal 35 ayat 1, Perda Kabupaten Kediri Tentang BPD mengatur tentang Hubungan 2 | Vol. 1, No. 1, April

 **Plagiarism detected: 0,2%** <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/articl...> id: 6
2017 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu

Administrasi Negara : 1 - 10 Kerja BPD dengan Pemerintah Desa, yang menyebutkan: Hubungan kerja

 **Plagiarism detected: 0,2%** <https://ejournal.unsrat.ac.id/index...> + 5 more resources! id: 7
Badan Permasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa

merupakan hubungan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Antara BPD dan Pemerintahan Desa memiliki kedudukan yang sama dan hal tersebut sebagai cerminan demokrasi, yaitu BPD memiliki fungsi sebagai badan konsulatif dan koordinatif. Selanjutnya keberadaan BPD dalam pemerintahan desa membawa konsekuensi bahwa dalam perjalanan pemerintahan sudah tentu membawa berbagai penyesuaian atau perubahan dalam struktur organisasi. Oleh karena itu pertanyaan yang muncul antara lain : 1. Bagaimana peranan BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa ? 2. Kontribusi seperti apa yang diberikan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa ? 3. Sejauh mana program kerja BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa ? 4. Aspek-aspek apa saja yang berkaitan dengan

 **Plagiarism detected: 0,2%** <https://www.slideshare.net/andykafa...> + 2 more resources! id: 8
Hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa

? 5. Bagaimanakah Hubungan Kerja

 **Plagiarism detected: 0,36%** <https://ejournal.unsrat.ac.id/index...> + 6 more resources! id: 9
Badan Permasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa Gurah Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri


? 6. Faktor-Faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat hubungan kerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dengan Pemerintah

 **Plagiarism detected: 0,2%** <http://eprints.umm.ac.id/4359/> id: 10
Desa Gurah Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri


? 2. Tinjauan Kepustakaan 1.1. Badan Permasyarakatan Desa Badan Pemerintahan Desa (BPD) menurut

 **Plagiarism detected: 1,29%** <https://alhanisberbagiilmu.blogspot...> + 40 more resources! id: 11
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah: Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Sedangkan Pengertian BPD berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 9 Tahun 2006 yaitu : Badan Permasyarakatan Desa yang biasa disingkat dengan

 **Plagiarism detected: 0,53%** <https://ppknsalasiah.blogspot.com/2...> + 19 more resources! id: 12
BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Adapun keanggotaan BPD memperhatikan keterwakilan dusun. Keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan wilayah adalah keanggotaan BPD harus memperhatikan keterwakilan dusun. yang terdiri

 **Plagiarism detected: 0,33%** <https://docplayer.info/65035284-Lem...> + 6 more resources! id: 13
dari Ketua RW, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat

lainnya. Selain itu BPD adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Mekanisme pengisian anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat dengan basis perwakilan wilayah, dilaksanakan melalui Rapat Dusun dan Rapat Desa. Tugas BPD meliputi (1). Membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, yang isinya mengatur kehidupan masyarakat, misalnya Peraturan Desa tentang

pengaturan tanah bengkok. (2). Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. (3).

 **Plagiarism detected: 0,23%** <https://nandikaagung.blogspot.com/2...> + 3 more resources! id: 14

Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam

 **Plagiarism detected: 0,2%** <https://docplayer.info/65035284-Lem...> + 3 more resources! id: 15

peraturan daerah Kabupaten Kediri Nomor 9

pasal 18 Tahun 2006, BPD bersama Kepala Desa mempunyai fungsi menetapkan peraturan Desa. Adapun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 9 pasal 19 Tahun 2006, BPD mempunyai wewenang (1).

 **Plagiarism detected: 1,02%** <https://ppknsalasiah.blogspot.com/2...> + 29 more resources! id: 16

Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. (2). Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. (3). Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. (4). Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. (5).

 **Plagiarism detected: 0,23%** <https://docplayer.info/65035284-Lem...> + 12 more resources! id: 17


Menggal, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi

masyarakat. (6). Menyusun tata tertib BPD. Jika demikian maka berdasarkan kewenangan yang dimiliki maka BPD bisa juga disebut Badan Legislatif Desa, adapun Pemerintah Desa sebagai badan eksekutif desa. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara 3 Hubungan Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD).... (Fauziah Hanum) Berikutnya dalam

 **Plagiarism detected: 0,2%** <https://docplayer.info/65035284-Lem...> + 3 more resources! id: 18

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9

pasal 20 Tahun 2006 BPD mempunyai hak untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan menyatakan pendapat, selain itu anggota BPD berdasarkan pasal 21 juga mempunyai hak antara lain (1). Mengajukan rancangan desa. (2) Mengajukan pertanyaan. (3). Menyampaikan usul dan pendapat. (4). Memilih dan dipilih (5). Memperoleh

 **Plagiarism detected: 0,2%** <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/f...> + 3 more resources! id: 19

tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Adapun kewajiban BPD antara lain (1) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan

 **Plagiarism detected: 1,02%** <https://ppknsalasiah.blogspot.com/2...> + 23 more resources! id: 20


Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan. (2). Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. (3). Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4). Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat. (5). Memproses pemilihan Kepala Desa. (6).

 **Plagiarism detected: 0,99%** <https://ppknsalasiah.blogspot.com/2...> + 26 more resources! id: 21

Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. (7). Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. (8). Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Selain kewajiban sebagaimana tersebut diatas dan sebelum berakhir masa jabatannya, maka BPD mempunyai kewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Kepala Daerah (Bupati) melalui Camat dan laporan tersebut juga disampaikan kepada masyarakat melalui forum rapat desa. 1.2. Pemerintah Desa Menurut

 **Plagiarism detected: 0,3%** <https://ppknsalasiah.blogspot.com/2...> + 19 more resources! id: 22

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

pada pasal 1 ayat 3, yang dimaksud Pemerintah

 **Plagiarism detected: 0,63%** <https://alhanisberbagiilmu.blogspot...> + 33 more resources! id: 23

Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan

yang dimaksud

 **Plagiarism detected: 1,62%** <https://alhanisberbagiilmu.blogspot...> + 37 more resources! id: 24

desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah : Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sitem

 **Plagiarism detected: 0,2%** <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/f...> + 2 more resources! id: 25


pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya

pengertian Pemerintah Desa, berdasarkan

 **Plagiarism detected: 0,26%** <https://docplayer.info/65035284-Lem...> + 4 more resources! id: 26


Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2006

berbunyi :

 **Plagiarism detected: 0,46%** <https://alhanisberbagiilmu.blogspot...> + 20 more resources! id: 27

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Sedangkan

yang dimaksud dengan

 **Plagiarism detected: 0,99%** <https://alhanisberbagiilmu.blogspot...> + 44 more resources! id: 28

Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam

sisten pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Karakteristik Desa ditinjau dari Aspek Morfologis

 **Plagiarism detected: 0,59%** <https://nicofergiyono.blogspot.com/...> + 9 more resources! id: 29

Desa ialah pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang

terpencar. Dari aspek ekonomi

 **Plagiarism detected: 1,78%** <https://nicofergiyono.blogspot.com/...> + 11 more resources! id: 30

desa ialah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermata pencaharian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam atau agraris dan nelayan. Jika dilihat dari segi sosial budaya, desa itu nampak dari hubungan sosial antar penduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan dan kurang nampak adanya pengkotaan, atau dengan kata lain bersifat

homogen serta bergotong royong. Jika dilihat dari

 **Plagiarism detected: 0,46%** <https://nicofergiyono.blogspot.com/...> + 4 more resources! id: 31

aspek hukum, desa merupakan kesatuan wilayah hukum tersendiri (P.J.M. Nas, 1979:28-29 dan

Sutardjo, 1984:16). Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia secara bersama-sama mewujudkan suatu masyarakat dan kemudian menempati suatu teritorial yang tetap. Alasan pokok untuk membentuk masyarakat desa yang sedemikian rupa diantaranya adalah (1). Untuk hidup, yakni memenuhi makan, pakaian dan perumahan (keperluan sik). (2). Untuk mempertahankan hidupnya dari ancaman dari luar, dan (3). Untuk 4 | Vol. 1, No. 1, April

 **Plagiarism detected: 0,2%** <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/articl...> id: 32

2017 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu

Administrasi Negara mencapai kemajuan dalam hidupnya. Telah dijelaskan dimuka, bahwa pola sikap dan tingkah laku seorang anggota masyarakat banyak dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor,

 **Plagiarism detected: 0,36%** <https://pengertiankompli.blogspot....> + 2 more resources! id: 33


antara lain dari lingkungan hidup, baik lingkungan alami maupun lingkungan sosial,

serta faktor dari heritage (keturunan) dan pengalaman serta pendidikan dan pengetahuan yang diperolehnya,

 **Plagiarism detected: 0,33%** <http://digilib.uinsby.ac.id/11372/5...> + 2 more resources! id: 34

Lingkungan alami sebagai lingkungan hidup manusia yang sangat bervariasi kondisi

dan letak geogra nya turut pula memberi watak kepada penghuninya, sehingga memberikan suatu ciri khas yang berbeda dengan msyarakat desa yang lain.

 **Plagiarism detected: 0,56%** <https://baluartitossriya.wordpress....> + 5 more resources! id: 35

Masyarakat desa selalu dikonotasikan dengan ciri tradisional, kuatnya ikatan dengan alam, eratnya ikatan kelompok, guyup rukun, gotong

royong, yang semakna dengan gemenshalf atau community. Jen A. Quin dalam bukunya bahwa yang membedakan masyarakat kota dengan masyarakat desa dilihat dari tiga segi, yaitu (1). Peran masing-masing anggota masyarakat desa.


 **Plagiarism detected: 0,43%** <http://repository.upi.edu/13126/4/S...> id: 36

Pada masyarakat kota yang sudah dewasa, seseorang dapat berperan pada bermacam-macam organisasi

| | | |
|--|--|--------|
| yang | | |
| berbedabeda sesuai dengan kesanggupannya (multiple membership), | | |
|  Plagiarism detected: 0,23% http://repository.upi.edu/13126/4/S... | | id: 37 |
| sedangkan di desa, peranan individu sangat sederhana. | | |
| (2). Lapangan pekerjaan di desa bersifat agraris | | |
|  Plagiarism detected: 0,92% http://repository.upi.edu/13126/4/S... | | id: 38 |
| oleh karena itu lapangan kerja warganya adalah bidang pertanian, mereka pada umumnya masih tergantung kepada alam. Sedangkan masyarakat kota adalah non agraris, oleh karena itu lapangan pekerjaan sangat | | |
| bervariasi menurut kemampuan dan ada kecenderungan untuk menguasai dan mengendalikan alam. (3). Komposisi sosial | | |
|  Plagiarism detected: 0,2% http://repository.upi.edu/13126/4/S... | | id: 39 |
| kota mempunyai komposisi sosial yang sangat | | |
| komplek, sedangkan di desa sebaliknya bersifat homogen. Pemerintah Desa berdasarkan | | |
|  Plagiarism detected: 0,23% https://docplayer.info/65035284-Lem... + 3 more resources! | | id: 40 |
| Perda Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2006 | | |
|  Plagiarism detected: 0,36% https://ppknsalasiah.blogspot.com/2... + 18 more resources! | | id: 41 |
| adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. | | |
| Adapun pengertian Kepala | | |
|  Plagiarism detected: 0,23% https://mahenraz.wordpress.com/2010... + 2 more resources! | | id: 42 |
| Desa adalah : Unsur Pemerintah Desa yang | | |
| bertugas | | |
|  Plagiarism detected: 0,36% https://alhanisberbagiilmu.blogspot... + 17 more resources! | | id: 43 |
| memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permasyarakatan | | |
| Desa. | | |
|  Plagiarism detected: 2,34% https://alhanisberbagiilmu.blogspot... + 14 more resources! | | id: 44 |
| Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat. Sedangkan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa berkewajiban melaksanakan koordinasi atas segala pemerintahan desa, mengadakan pengawasan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang. Apabila terjadi kekosongan Perangkat Desa, maka Kepala Desa atas persetujuan BPD mengangkat pejabat perangkat desa. | | |
| 1.3. Hubungan Kerja | | |
|  Plagiarism detected: 0,43% https://nurus-zaman.blogspot.com/20... + 5 more resources! | | id: 45 |
| Badan Permasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa. Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa | | |
| dalam pembahasan ini tampak dalam mekanisme hubungan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasayakatan, hal ini sesuai | | |
|  Plagiarism detected: 0,36% https://docplayer.info/65035284-Lem... + 5 more resources! | | id: 46 |
| dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Pasal 35 ayat 1 yang berbunyi : | | |
|  Plagiarism detected: 0,2% https://www.slideshare.net/andykafa... + 2 more resources! | | id: 47 |
| Hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa | | |
| merupakan kemitraan | | |
|  Plagiarism detected: 0,2% https://nurus-zaman.blogspot.com/20... + 2 more resources! | | id: 48 |
| dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan | | |
| Kemasyarakatan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, | | |
|  Plagiarism detected: 0,2% https://www.slideshare.net/andykafa... + 2 more resources! | | id: 49 |
| hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa | | |
| merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, sedangkan Pemerintah Desa dan warga masyarakat mempunyai hubungan timbal balik | | |

| |
|---|
| <p> Plagiarism detected: 0,2% https://nurus-zaman.blogspot.com/20... + 2 more resources! id: 50</p> |
| <p>dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun pengertian Hubungan kemitraan secara teoritis Eister dan Montuore (1997) membuat pernyataan yang berbunyi sebagai berikut : Memulai dengan</p> |
| <p> Plagiarism detected: 0,33% https://journal.unismuh.ac.id/index... + 2 more resources! id: 51</p> |
| <p>mengakui dan memahami kemitraan pada diri sendiri dan orang lain, menemukan alternative yang kreatif bagi pemikiran dan perilaku donator merupakan langkah pertama kearah membangun sebuah organisasi kemitraan. : 1 - 10 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara 5</p> |
| <p> Plagiarism detected: 0,2% https://nurus-zaman.blogspot.com/20... id: 52</p> |
| <p>Hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa, pada awalnya sering terjadi ketidak harmonisan, hal tersebut dikarenakan : 1) Cara pemahaman peraturan yang kurang menyeluruh yang disebabkan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang relatif rendah, sehingga pemahaman terhadap Undang-Undang hanya sepotong potong; 2) Sering terjadi ketidak disiplin terhadap tata tertib yang dibuat oleh mereka sendiri 3) Kesalah pahaman terhadap hak dan kewajiban mereka. Sekarang</p> |
| <p> Plagiarism detected: 0,2% https://www.slideshare.net/andykafa... + 2 more resources! id: 53</p> |
| <p>hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa menjadi lebih baik, dikarenakan beberapa hal, antara lain : 1) Tumbuhnya kesadaran pengertian tentang hak dan kewajiban mereka. 2) Setiap terdapat kegiatan yang menyangkut tugas kemasyarakatan dan pembangunan, sejak awal sampai terakhir BPD telah dilibatkan oleh pemerintah desa. 3) Pemerintah Desa dan BPD menyadari, bahwa mitra kerja yang dimaksud adalah saling memahami, saling mengisi dan memecahkan masalah secara bersama sama. Namun demikian meskipun</p> |
| <p> Plagiarism detected: 0,2% https://www.slideshare.net/andykafa... + 2 more resources! id: 54</p> |
| <p>hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa dapat dikatakan berjalan dengan baik, dan cukup harmonis, tapi bukan berarti berjalan tanpa hambatan. Sedangkan beberapa model hubungan dalam organisasi menurut pendapat Juki (1991) adalah : 1)</p> |
| <p> Plagiarism detected: 1,82% http://digilib.unila.ac.id/11484/3/... + 3 more resources! id: 55</p> |
| <p>Hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. 2) Hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. 3) Hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.</p> |
| <p>Sedangkan Sistem Hubungan Kemitraan, bertumpu pada kepercayaan, dengan ciri-ciri antara lain : 1) Persamaan dan organisasi yang lebih landai. 2) Hierarki aktualisasi yang luwes, dimana kekuasaan dipedomi oleh nilai-nilai seperti caring dan</p> |
| <p> Plagiarism detected: 0,17% http://digilib.unila.ac.id/11484/3/... + 5 more resources! id: 56</p> |
| <p>caretaking. 3) Spiritualitas yang berbasis alamiah. 4) Tingkat kekacauan yang rendah yang terbentuk dalam sistem. 5) Persamaan dan keadilan gender. Selanjutnya dimensi kemitraan hubungan kerja, Butler dan Waldroop mengemukakan sebagai berikut : 1) Pengaruh professional; yang menikmati pekerjaan mereka, senang memperkembangkan</p> |
| <p> Plagiarism detected: 0,26% https://hansenkammer.wordpress.com/... + 4 more resources! id: 58</p> |
| <p>dan memperluas area pengaruh mereka. Mereka senang dalam hal persuasi, negosiasi, dan memegang informasi serta ide-ide penting. Tipikal bagi negosiator pembuat kebijakan/keputusan. 2) Fasilitas interpersonal;</p> |
| <p> Plagiarism detected: 0,23% https://hansenkammer.wordpress.com/... + 4 more resources! id: 59</p> |
| <p>orang-orang yang senang dengan aspek interpersonal dalam situasi pekerjaan. Mereka secara intuitif</p> |
| <p> Plagiarism detected: 2,94% https://hansenkammer.wordpress.com/... + 4 more resources! id: 60</p> |
| <p>berfokus pada pengalaman orang lain dan mereka biasa bekerja dibelakang layar. Dengan cara ini mereka membuat rekanrekan sekerjanya menjadi berkomitmen dan terikat untuk mengerjakan proyek dengan lancar. Tipikal bagi manajer SDM. 3) Kreati tas hubungan; orang-orang yang bagus dalam membina hubungan</p> |

dengan sekelompok orang melalui penggambaran visual dan verbal. Tipikal bagi orang-orang pemasaran dan manajer. 4) Kepemimpinan tim; orang-orang ini ingin melihat orang lain dan berinteraksi dengan mereka. Mereka menyukai pekerjaan manajemen dan bekerja dalam tim berenergi tinggi dalam situasi yang padat. Tipikal bagi manajer program dan manajer delivery.

 **Plagiarism detected: 0,23%** <http://jurnal-online.um.ac.id/data/...> + 5 more resources! id: 61

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra ke

rja Pemerintah Desa, maka Hubungan Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD)... (Fauziah Hanum)
6 | Vol. 1, No. 1, April

 **Plagiarism detected: 0,2%** <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/articl...> id: 62

2017 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu

Administrasi Negara diharapkan akan membuka peluang baru bagi terwujudnya desa yang mandiri. Untuk mewujudkan desa yang mandiri dituntut adanya perubahan wawasan pembangunan. Dengan adanya perubahan wawasan pembangunan ini diharapkan akan diikuti

 **Plagiarism detected: 0,23%** <http://ejournal.pin.or.id/site/wp-c...> + 3 more resources! id: 63

dengan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BP

D) yang lebih optimal dalam rangka mendorong masyarakat untuk mampu mengidenti kasikan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya serta merencanakan, memprakarsai dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program/proyek pembangunan desa yang berada di desa, sehingga pada akhirnya pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kehendak rakyat dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa. Adapun konsep implementasi Perda Kabupaten Kediri yang terkait dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan tahapan penerapan/pelaksanaan kebijakan publik setelah diformulasikan pemerintah. Pelaksanaan kebijakan sebenarnya merupakan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang. Keputusan tersebut mengidenti kasikan masalah

 **Plagiarism detected: 0,2%** <https://industri3604.wordpress.com/...> + 2 more resources! id: 64

yang ingin dicapai dengan berbagai cara

untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. (Wahab, 1991).

 **Plagiarism detected: 0,2%** <http://media.unpad.ac.id/thesis/170...> id: 65

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa

yang dimaksud dengan Implementasi

 **Plagiarism detected: 0,26%** <https://docplayer.info/65035284-Lem...> + 4 more resources! id: 66

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2006


Pasal 35 Tentang

 **Plagiarism detected: 0,2%** <https://www.slideshare.net/andykafa...> + 2 more resources! id: 67

Hubungan Kerja BPD dengan Pemerintah Desa

adalah Proses pelaksanaan kebijakan daerah tentang Hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa sebagai sebuah lembaga legislatif yang berada dalam sistem pemerintahan desa di era otonomi daerah, maka keberadaannya diharapkan mampu untuk dapat berfungsi secara optimal dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan desa. Agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat berfungsi secara optimal, maka perlu memiliki kapasitas tertentu berdasarkan atas tugas pokok dan wewenang yang diembannya. 3. Metode Penelitian Mendasarkan pada karakter permasalahan dan fokus penelitian, dan agar dapat menjawab permasalahan maka didekati dengan pendekatan kualitatif. Adapun lokasi penelitian dipilih di desa Gurah Kecamatan Gurah dengan alasan, desa Gurah merupakan ibu kota kecamatan Gurah, namun hubungan kemitraan antara BPD dan Pemerintah Desa disharmonis. Fokus penelitian pertama :

- Membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, yang berisi mengatur kehidupan masyarakat. Misalnya Peraturan Desa tentang Pengaturan tanah bengkok.

 **Plagiarism detected: 0,2%** <https://desacandimulyo.wordpress.co...> + 2 more resources! id: 68

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

c.

 **Plagiarism detected: 0,2%** <https://asepjazuli.blogspot.com/201...> id: 69


Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

d.

 **Plagiarism detected: 0,33%** <https://alhanisberbagiilmu.blogspot...> + 13 more resources! id: 70

Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

e. Mengajukan rancangan Peraturan Desa. f.

| | |
|--|--------|
| <p> Plagiarism detected: 0,5% https://alhanisberbagiilmu.blogspot... + 10 more resources!</p> <p>Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.</p> | id: 71 |
| <p>g. Membina kehidupan masyarakat desa. h. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. i. Melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Fokus penelitian yang kedua yaitu : Faktor yang mendukung dan yang menghambat</p> | |
| <p> Plagiarism detected: 0,2% https://www.slideshare.net/andykafa... + 2 more resources!</p> <p>Hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa</p> | id: 72 |
| <p>Gurah. Adapun faktor yang mendukung adalah sebagai berikut : a.</p> | |
| <p> Plagiarism detected: 0,2% https://ppknsalasiah.blogspot.com/2... + 17 more resources!</p> <p>Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan</p> | id: 73 |
| <p>Desa. b. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat. c. Memproses pemilihan Kepala Desa. Sedangkan faktor yang menghambat adalah sebagai berikut : a. Menyampaikan usul dan pendapat, tetapi : 1 - 10</p> <p>Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara 7 kurang mendapat perhatian b. Memperoleh tunjangan yang kurang sesuai, bila dibandingkan dengan beban kerja yang harus dilaksanakan. Teknik penentuan informan dengan purposive, dan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Bogdan dan Biklen (1982:13) merupakan pengamatan berperanserta (participant observation) dan wawancara secara mendalam (indepth interview), bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur</p> | |
| <p> Plagiarism detected: 0,56% http://digilib.uinsby.ac.id/11029/4...</p> <p>penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.</p> | id: 74 |
| <p>Data yang terkumpul diuji terlebih dahulu dengan keabsahan data (validasi data) kemudian dianalisis dengan teknik analisis interaktif dari Miles dan Huberman (pengumpulan data, reduksi data, disply data, dan penarikan kesimpulan) dalam Lexy, Moleong. 2000. Hubungan Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD).... (Fauziah Hanum)</p> <p>8 Vol. 1, No. 1, April</p> | |
| <p> Plagiarism detected: 0,2% https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/articl...</p> <p>2017 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu</p> | id: 75 |
| <p>Administrasi Negara 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan : 1 - 10</p> <p>Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara 9 Hubungan Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD).... (Fauziah Hanum)</p> <p>10 Vol. 1, No. 1, April</p> | |
| <p> Plagiarism detected: 0,2% https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/articl...</p> <p>2017 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu</p> | id: 76 |
| <p>Administrasi Negara DAFTAR PUSTAKA Lincoln dan Y Vonna,S dan Egon Guba, 1985, Naturakistik Inguiry, 1 st Edition, Beverly Hills, Sage Publication. Moleong, Lexy, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.</p> | |
| <p> Plagiarism detected: 0,23% https://peraturan.bpk.go.id/Home/De... + 5 more resources!</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 tahun</p> | id: 77 |
| <p>2006 tentang Pemerintahan Desa.</p> | |
| <p> Plagiarism detected: 0,4% https://docplayer.info/65035284-Lem... + 5 more resources!</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.</p> | id: 78 |
| <p>Stefani Manganang, 2013, Jurnal Judul Kemitraan Pemerintah Desa Dengan BPD Dalam Pemerintahan, Minahasa.</p> | |
| <p> Plagiarism detected: 0,23% https://ppknsalasiah.blogspot.com/2... + 22 more resources!</p> <p>Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.</p> | id: 79 |
| <p>Widjaja, H.A.W, 2008,</p> | |
| <p> Plagiarism detected: 0,3% https://ppknsalasiah.blogspot.com/2... + 6 more resources!</p> <p>Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh,</p> <p>Jakarta, Rajawali Press. : 1 - 10</p> | id: 80 |



Plagiarism Detector
Your right to know the authenticity!